

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Maret 2024 PT SATRIA MEGA KENCANA TBK DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama

: Martinelly

Alamat Kantor

: Jl. Panglima Polim Raya No. 28,

Pulo, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,

DKI Jakarta

Jabatan

: Direktur Utama

2. Nama

: Floreta Tane

Alamat Kantor

: Jl. Panglima Polim Raya No. 28,

Pulo, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,

DKI Jakarta

Jabatan

: Direktur

Menyatakan bahwa:

- 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan,
- 2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia,
- 3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar.
- 4. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau factor material,
- 5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 12 Juli 2024

Atas ama lan mewakili Direksi,

3CALX232441932

Direktur Utama

Direktur

Toreta Tane

Daftar Perubahan Pada Revisi Laporan Keuangan Interim Perseroan periode 31 Maret 2024:

Neraca

- 1. Terdapat perubahan pada Asset Tetap periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 2. Terdapat perubahan pada Asset Pajak Tangguhan periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 3. Terdapat perubahan pada Hutang Usaha Pihak Ketiga periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 4. Terdapat perubahan pada Utang Pajak Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 5. Terdapat Penambahan pada Liabilitas Pajak Tangguhan periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 6. Terdapat Perubahan pada Surplus Revaluasi Aset Tetap perode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Penurunan.
- 7. Terdapat Perubahan pada Pendapatan Komprehensif Lainnya perode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Penurunan.
- 8. Terdapat Perubahan pada Saldo Laba ditahan perode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan dan Penurunan.
- 9. Terdapat Perubahan pada Kepentingan Non Pengendali perode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.

Daftar Perubahan Pada Revisi Laporan Keuangan Interim Perseroan periode 31 Maret 2024:

Laba Rugi

- 1. Terdapat Perubahan Pada Beban Penjualan Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 2. Terdapat Perubahan Pada Jumlah Laba Kompherensif Tahun Berjalan Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 3. Terdapat Perubahan Pada Pemilik Entitas Induk Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 4. Terdapat Perubahan Pada Kepentingan Non-Pengendali Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 5. Terdapat Perubahan Pada Persentase Rugi Persaham Dasar dan Rugi Persaham Dasar Dilusinkan Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.

Daftar Perubahan Pada Revisi Laporan Keuangan Interim Perseroan periode 31 Maret 2024:

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1. Terdapat Perubahan Pada No. 4 (Kas dan Setara Kas) Rupiah PT Bank Central Asia Tbk Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami kenaikan.
- 2. Terdapat Perubahan Pada No. 10 (Asset Tetap Lanjutan) Beban umum dan administrasi (Catatan 27) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Kenaikan.
- 3. Terdapat Penambahan Pada No. 10 (Analisis Laba (Rugi) terkait timbul dari Penjualan asset tetap) pada harga jual periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

- Terdapat Penambahan Pada No. 10 Surplus Revaluasi Asset Tetap diikhtisarkan periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 terkait Nilai wajar dan Nilai buku sebelum revaluasi dan revaluasi.
- 5. Terdapat Perubahan Pada No. 12 a (Persentase Terhadap Jumlah Asset) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Penurunan.
- 6. Terdapat Perubahan Pada No. 12 c (Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Kenaikan.
- 7. Terdapat Perubahan Pada No. 16 b (Jumlah Utang Pajak) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Kenaikan.
- 8. Terdapat Perubahan Pada No. 20 (Jumlah Jaminan Pelanggan) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 yang tidak ada perubahan Angka.
- 9. Terdapat Perubahan Pada No. 23 (Kepentingan Non Pengendali atas asset bersih entitas anak Vonny Kristiani) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Kenaikan dan Penurunan.
- 10. Terdapat Perubahan Pada No. 20 (Pendapatan Usaha) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, ada pada penulisan tahun berakhir.
- 11. Terdapat Perubahan Pada No. 27 (Beban Umum Dan Administrasi), Urutan Nominal Besar Kecil Pada Biaya administrasi pada Perlengkapan kantor dan Rumah Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, yang mengalami Kenaikan.
- 12. Terdapat Perubahan Pada No. 29 (Jumlah Nilai Wajar Instrumen Keuangan pada Nilai Tercatat dan Nilai Wajar) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 yang tidak ada perubahan Angka.
- 13. Terdapat Perubahan Pada No. 30 (Jumlah Pengelolaan Modal Utang Bersih, Jumlah Ekuitas dan Rasio Pengungkit) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 yang tidak ada perubahan Angka.
- 14. Terdapat Perubahan Pada No. 31 (Rugi untuk Perhitungan Rugi Bersih Per Saham dan Persentase Rugi Per Saham Dasar dan dilusian) Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 yang mengalami Kenaikan.

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET

	Catatan	31 Maret 2024	31 Desember 2023
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2f, 4	9.855.362.014	11.887.905.520
Piutang Usaha - Pihak Ketiga - Bersih	2g, 5	745.773.728	396.263.229
Piutang Lain-Lain:			
- Pihak Ketiga	2g, 6	42.716.248	58.384.387
Persediaan	2h, 7	382.329.258	385.873.463
Perlengkapan	2h, 8	1.508.454.985	1.518.124.897
Pajak Dibayar Di Muka	2q, 16a	4.730.068.565	4.777.827.539
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	2i, 9	1.302.472.654	670.735.530
Jumlah Aset Lancar	_	18.567.177.452	19.695.114.565
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Pihak Berelasi	2e, 6,12b	2.008.239.877	2.008.239.877
Biaya Dibayar di Muka	2i, 9	9.261.667	11.702.952
Aset Tetap	2k, 10	407.972.024.015	409.326.964.514
Aset Pajak Tangguhan	2q, 16d	1.908.319.772	1.908.319.772
Aset Lain-lain	11	1.200.000.000	1.200.000.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	_	413.097.845.331	414.455.227.115
JUMLAH ASET	=	431.665.022.783	434.150.341.680

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS

	Catatan	31 Maret 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha - Pihak Ketiga - Bersih	2n, 13	638.787.583	492.188.083
Utang Lain-Lain:			
- Pihak Ketiga	14	13.693.494	157.627.012
- Pihak Berelasi	2e, 12d	2.224.318.750	1.740.457.000
Utang Pajak	2q, 16b	963.151.525	935.493.435
Beban Akrual	15	1.591.256.691	1.844.386.627
Jaminan Pelanggan	20	489.243.219	702.173.759
Liabilitas Jangka Panjang- Bagian yang jatuh			
tempo dalam Waktu Satu Tahun:			
- Utang Bank	17	8.000.350.076	7.698.700.925
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	2r, 18	60.445.000	60.445.000
Jumlah Liabiltas Jangka Pendek	-	13.981.246.338	13.631.471.841
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pihak Berelasi	12d, 14	98.947.499.168	95.277.499.168
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi			
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu			
Satu Tahun:			
- Utang Bank	17	56.361.346.780	58.587.318.184
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	2r, 18	76.930.000	93.415.000
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2s, 19	1.515.385.440	1.515.385.440
Liabilitas Pajak Tangguhan		53.513.222.438	53.513.222.438
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	_	210.414.383.826	208.986.840.230
Jumlah Liabilitas	-	224.395.630.164	222.618.312.071

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 MARET 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret 2024	31 Desember 2023
EKUITAS	-		
Modal Saham			
Modal Dasar 2.400.000.000 saham			
dengan nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
-1.000.003.979 lembar saham pada 31 Maret 2024			
dan 31 Desember 2023	21	100.000.397.900	100.000.397.900
Tambahan Modal Disetor	22	14.491.453.870	14.491.453.870
Surplus Revaluasi Aset Tetap		183.875.074.658	183.875.074.658
Pendapatan Komprehensif Lainnya		1.561.103.217	1.561.103.217
Saldo Laba Ditahan	_	(102.639.989.781)	(98.403.115.285)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Didistribusikan			
kepada Pemilik Entitas Induk		197.288.039.864	201.524.914.360
Kepentingan Non Pengendali	23	9.981.352.755	10.007.115.249
Jumlah Ekuitas	_	207.269.392.619	211.532.029.609
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	_	431.665.022.783	434.150.341.680

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret 2024	31 Maret 2023
PENDAPATAN			_
Hotel		4.524.983.564	5.055.493.793
Spa	_	25.391.736	31.785.124
Jumlah Pendapatan	2p, 24	4.550.375.300	5.087.278.917
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Hotel		(1.706.962.758)	(1.645.252.993)
Spa	_	(15.901.652)	(20.634.708)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	2p, 25	(1.722.864.410)	(1.665.887.701)
LABA KOTOR		2.827.510.890	3.421.391.216
BEBAN USAHA			
Beban Penjualan	2p, 26	(240.777.278)	(171.736.273)
Beban Umum dan Administrasi	2p, 27	(5.149.313.851)	(4.593.793.381)
Jumlah Beban Usaha		(5.390.091.129)	(4.765.529.654)
RUGI USAHA		(2.562.580.239)	(1.344.138.438)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Bunga		56.417.350	23.314.066
Beban Keuangan	28	(1.739.803.983)	(1.926.588.527)
Beban Pajak		(88.000.000)	(23.655.041)
Lain-Lain - Bersih		71.329.882	9.122.309
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(1.700.056.751)	(1.917.807.193)
RUGI SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		(4.262.636.990)	(3.261.945.631)
Pajak Final	_		
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	_	(4.262.636.990)	(3.261.945.631)
RUGI TAHUN BERJALAN	_	(4.262.636.990)	(3.261.945.631)

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGA-TANGGAL

30 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret 2024	31 Maret 2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke			
Laba Rugi:			
Surplus Revaluasi Aset Tetap		-	-
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja		-	-
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Terkait	_	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	_	<u> </u>	<u> </u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	=	(4.262.636.990)	(3.261.945.631)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk		(4.236.874.496)	(3.251.120.414)
Kepentingan Non-Pengendali	_	(25.762.494)	(10.825.217)
Jumlah	=	(4.262.636.990)	(3.261.945.631)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			-
Pemilik Entitas Induk		(4.236.874.496)	(3.251.120.414)
Kepentingan Non-Pengendali	_	(25.762.494)	(10.825.217)
Jumlah	=	(4.262.636.990)	(3.261.945.631)
RUGI PER SAHAM DASAR	31	(4,24)	(3,25)
RUGI PER SAHAM DILUSINKAN	31	(5,30)	(4,06)

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGAL-TANGGAL 31 MARET 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	,		•					
SEBELUM PENYESUAIAN	100.000.007.500	14.489.466.870	198.532.390.144	1.705.037.444	(84.871.097.518)	229.855.804.440	11.914.127.545	241.769.931.985
Penyesuaian sehubungan dengan								
penerapan kebijakan akuntansi	<u> </u>	-	(43.677.125.831)	(82.178.172)	82.178.172	(43.677.125.831)	(2.554.718.540)	(46.231.844.371)
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	100.000.007.500	14.489.466.870	154.855.264.313	1.622.859.272	(84.788.919.346)	186.178.678.609	9.359.409.005	195.538.087.614
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	(3.251.120.414)	(3.251.120.414)	(10.825.217)	(3.261.945.631)
Pengukuran Kembali Liabilitas						-		
Imbalan Kerja, Setelah Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksi Ekuitas Lainnya	-				-	-	-	<u> </u>
SALDO PER 31 MARET 2023	100.000.007.500	14.489.466.870	154.855.264.313	1.622.859.272	(88.040.039.760)	182.927.558.195	9.348.583.788	192.276.141.983
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	(10.363.075.525)	(10.363.075.525)	(50.712.471)	(10.413.787.996)
Setoran Modal	390.400	1.987.000			-	2.377.400		2.377.400
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	29.019.810.345	-	-	29.019.810.345	709.220.460	29.729.030.805
Pengukuran Kembali Liabilitas						-		-
Imbalan Kerja, Setelah Pajak	-	-	-	(61.756.055)	-	(61.756.055)	23.472	(61.732.583)
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	100.000.397.900	14.491.453.870	183.875.074.658	1.561.103.217	(98.403.115.285)	201.524.914.360	10.007.115.249	211.532.029.609
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	(4.236.874.496)	(4.236.874.496)	(25.762.494)	(4.262.636.990)
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan						-		
Kerja, Setelah Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
Transaksi Ekuitas Lainnya	-			-	-	-	-	-
SALDO PER 31 MARET 2024	100.000.397.900	14.491.453.870	183.875.074.658	1.561.103.217	(102.639.989.781)	197.288.039.864	9.981.352.755	207.269.392.619

PT SATRIA MEGA KENCANA, Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Maret 2024	31 Maret 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas yang Diperoleh dari Pelanggan		3.922.126.737	5.014.623.118
Kas yang Dibayarkan kepada Pemasok		(2.137.092.545)	(3.063.904.693)
Kas yang Dibayarkan kepada Karyawan		(3.590.065.071)	(2.465.683.173)
Kas yang dihasilkan dari operasi	-	(1.805.030.879)	(514.964.748)
Penerimaan (Pembayaran):			
Pajak Penghasilan		31.420.671	(128.780.185)
Penerimaan Bunga		56.417.350	23.314.066
Penerimaan (Pengeluaran) Kas Lainnya		(488.870.559)	(259.272.921)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	-	(2.206.063.417)	(879.703.788)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	10	(7.775.000)	(70.770.290)
Aset Tetap dalam Pembangunan	10	(267.381.000)	(565.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	-	(275.156.000)	(635.770.290)
	-		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Peningkatan Piutang Lain-Lain - Pihak Berelasi		-	435.373.582
Pembayaran Liabilitas Sewa Pembiayaan	18	(16.485.000)	-
Pembayaran Utang Bank	17	(1.950.000.000)	(1.800.000.000)
Peningkatan Utang Lain-Lain - Pihak Berelasi		4.153.861.750	3.760.000.000
Pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan	17, 18, 28	(1.738.700.839)	(1.898.631.944)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	=	448.675.911	496.741.638
PENINGKATAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(2.032.543.506)	(1.018.732.440)
KAS DAN SETARA KAS, AWAL PERIODE	2f, 4	11.887.905.520	11.831.391.813
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR PERIODE	2f, 4	9.855.362.014	10.812.659.373

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Satria Mega Kencana Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH No.62 tanggal 16 Juni 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-10271HT.01.01.TH.2005 tanggal 14 April 2005. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No.231 tanggal 20 Desember 2023 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., sehubungan dengan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), antara lain tentang persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0160442 tertanggal 21 Desember 2023.

Pada tanggal 7 Juni 2023, terdapat perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, di mana kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang real estate yang di miliki sendiri atau di sewa; kawasan pariwisata; kawasan industri; real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; dan aktivitas perusahaan holding, dan perubahan dalam Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai pengumuman laporan keuangan Perusahaan sebagaimana di muat dalam Akta No.75 tanggal 7 Juni 2023. Perubahan dan penyesuaian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036710.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Juni 2023.

Pada saat ini, Perusahaan melakukan kegiatan berupa real estate dan kawasan pariwisata yang juga melakukan investasi saham pada Entitas Anak.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Panglima Polim Raya No.28, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2013.

Pemegang saham pengendali Perusahaan adalah Herman Herry Adranacus.

b. Penawaran Umum

Pada tanggal 23 Agustus 2018, melalui Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No.097/SMK-DIR/VII/2018 serta perubahan terakhir yang disampaikan melalui Surat No. 160/SMK-DIR/XI/2018 tanggal 28 November 2018, Perusahaan telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp165 per saham. Pada tanggal 30 November 2018, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-171/D.04/2018, Perusahaan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran. Selisih lebih jumlah yang diterima dari pengeluaran saham terhadap nilai nominalnya sebesar Rp21.299.134.834 di catat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" setelah dikurangi biaya emisi saham sebesar Rp4.700.865.166 (catatan 22). Pada tanggal 10 Desember 2018, seluruh saham Perseroan telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum (lanjutan)

Pada tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 200.000.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum, dan waran ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut. Rincian waran seri I yang sudah dikonversi sejak tahun 2019 sampai dengan per 31 Desember 2023 dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Nama Waran	Konversi	Saham	(Rp)	Pelaksanaan	saham x harga
Waran Seri I	11-07-2019	5	100	600	3.000
Waran Seri I	04-11-2020	10	100	600	6.000
Waran Seri I	11-02-2021	50	100	600	30.000
Waran Seri I	05-07-2021	10	100	600	6.000
Waran Seri I	30-11-2023	4	100	600	2.400
Waran Seri I	06-12-2023	800	100	600	480.000
Waran Seri I	07-12-2023	3100	100	600	1.860.000
Jumlah		3979			2.387.400

c. Entitas Anak

Pertanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki kepemilikan pada Entitas Anak berikut ini:

Entitas anak	Kedudukan	Jenis Usaha	Persentase kepemilikan efektif	Tahun operasi komersial	Jumlah aset sebelu	ım eleminasi
				_	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Kepemilikan langsung oleh	n Perusahaan			_	Rp. 000	Rp. 000
PT Tanjung Karoso Permai ("TKP")	Jakarta	Belum beroperasi	90,00	-	137.392.326	137.405.882
PT Dwimukti Mitra Wisata ("DMW")	Jakarta	Perhotelan	99,00	2013	93.254.211	92.259.086

i. Pendirian Entitas Anak

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan Vonny Kristiani mendirikan PT Tanjung Karoso Permai ("TKP") dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 90% dan 10% saham.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

ii. Pembelian Saham Entitas Anak

Pada tanggal 31 Januari 2013, Perusahaan membeli saham PT Dwimukti Mitra Wisata ("DMW") dari Yudi Adranacus dan Herman Herry Adranacus masing-masing sebanyak 50 lembar saham (atau sebesar 1% kepemilikan dalam DMW) dan 2.450 lembar saham (atau sebesar 49% kepemilikan dalam DMW) sehingga kepemilikan saham Perusahaan setelah pembelian tersebut adalah sebesar 50% dan sisanya dimiliki oleh Herman Herry Adranacus dan Vonny Kristiani masing masing sebesar 25%. Nilai buku aset bersih entitas anak pada saat pembelian adalah sebesar Rp5.000.000.000 dan tidak ada Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali yang dicatat terkait transaksi pembelian ini.

Pada tanggal 29 Maret 2018, Perusahaan membeli 49% kepemilikan saham dalam DMW dari Herman Herry Adranacus dan Vonny Kristiani masing-masing sebesar 1.250 lembar saham (atau sebesar 25% kepemilikan dalam DMW) dan 1.200 lembar saham (atau sebesar 24% kepemilikan dalam DMW) dengan harga beli Rp1.000.000 per lembar saham dengan total sebesar Rp2.450.000.000. Setelah pembelian saham tersebut, kepemilikan saham Perusahaan adalah 99% dan sisanya dimiliki oleh Vonny Kristiani sebesar 1%. Atas pembelian ini, timbul selisih antara nilai perolehan investasi dengan proporsi nilai buku aset bersih entitas anak sebesar Rp6.809.670.464 yang dicatat sebagai Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dalam akun Tambahan Modal Disetor dalam bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 (catatan 22).

d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Stevano Rizki Adranacus	Stevano Rizki Adranacus
Komisaris Independen	Husni Heron	Husni Heron
Direksi		
Direktur Utama	Martinelly	Martinelly
Direktur	Floreta Tane	Floreta Tane

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui pengangkatan kembali Floreta Tane selaku Direktur Perusahaan dan Husni Heron selaku Komisaris Independen Perusahaan, serta mengangkat Martinelly selaku Direktur Utama Perusahaan dan Stevano Rizki Adranacus selaku Komisaris Utama Perusahaan, terhitung sejak ditutupnya rapat. Perubahan ini diaktakan dengan akta notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. No.74 tanggal 7 Juni 2023 dan telah dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0132187 tanggal 27 Juni 2023.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Ketua	Husni Heron	Husni Heron
Anggota	Maskanah	Maskanah
	Aryo Kusumo Wibowo	Aryo Kusumo Wibowo
Sekretaris Perusahaan	Yovita	Yovita
Kepala Audit Internal	Anne Rahardja	Anne Rahardja

Pada tanggal 4 Juli 2023 terdapat perubahan jabatan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan surat keputusan Direksi Perusahaan no.168/SMK-Dir/SK/VII/2023 tentang pengangkatan sekretaris Perusahaan, mengangkat Yovita sebagai Sekretaris Perusahaan menggantikan Julia P.S. Daoriwoe. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.Ref.:169/SMK-Dir/VII/2023.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan dan Entitas Anak mempekerjakan masing-masing 14 karyawan tetap.

e. Izin Usaha Kawasan Industri

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan memiliki Izin Usaha Kawasan Industri yang berlokasi di jalan Panglima Polim Raya No.28 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan luas lahan 246 m2. Adapun rencana kegiatan adalah untuk Real Estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, kawasan pariwisata dan kawasan industri.

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 29 April 2024

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No.VIII.G7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disajikan berdasarkan konsep Biaya Perolehan (Historical Cost), kecuali beberapa akun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam masing-masing Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian diungkapkan di Catatan 2w.

Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan dasar Akrual (Accrual basis), kecuali Laporan Arus Kas Konsolidasian. Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode Langsung (Direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku

- · PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- · Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian laporan keuangan konsolidasian Klasifikasi Kewajiban
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian laporan keuangan konsolidasian Pengungkapan Kebijakan
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan -
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- · Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang sewa jual dan sewa balik

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 101 "Penyajian laporan keuangan konsolidasian Syariah"
- Amendemen PSAK 109 "Zakat, Infak, dan Sedekah" tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan konsolidasian" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2025

Amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"

Pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012) tersebut, unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas (lihat poin (iii) di bawah), setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Nilai perolehan diukur pada nilai wajar aset yang dialihkan, kepemilikan ekuitas yang diterbitkan, atau liabilitas yang diakui pada tanggal transaksi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan. Goodwill pada entitas asosiasi merupakan selisih lebih dari nilai perolehan entitas asosiasi atas bagian Grup atas nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas asosiasi dan dimasukkan dalam nilai tercatat investasi. Jika bagian Grup atas nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas asosiasi melebihi nilai perolehannya dalam kasus pembelian diskon, selisih tersebut diakui pada laba rugi.

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(iv) Metode ekuitas

Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee pada laba rugi dan bagiannya dalam pergerakan penghasilan komprehensif lainnya dari investee pada penghasilan komprehensif lainnya.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2m.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup. Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian setiap entitas anak di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Untuk tujuan konsolidasi, untuk entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan konsolidasian entitas anak Grup tersebut ke dalam Rupiah disajikan dalam akun "Penghasilan komprehensif lainnya" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs Dolar Amerika Serikat (Dolar AS atau AS\$) terhadap Rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh bank Indonesia per 31 Maret 2024 adalah Rp15.853 dan per 31 Desember 2023 dalam nilai penuh adalah Rp15.416.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun aset lain-lain "kas yang dibatasi penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang lain-lain adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan disajikan sebagai "(beban)/pendapatan lainlain, neto" untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "(beban)/pendapatan lain-lain, neto" pada laba rugi.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan persediaan di nilai dengan menggunakan metode Rata-rata (Average method). Penyisihan persediaan usang dan penyisihan penurunan nilai persediaan ditentukan untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Pembayaran dimuka adalah biaya yang dibayar dimuka dan dicatat sebagai aset sebelum dimanfaatkan. Akun ini terdiri dari uang muka pembelian dan biaya dibayar dimuka. Uang muka pembelian merupakan pembayaran dimuka atas pembelian perlengkapan keperluan operasional dan beban lainnya. Pembayaran dimuka dialokasikan selama jangka waktu pembayaran dan dibebankan ke akun yang sesuai dalam laporan laba rugi saat terjadinya. Pembayaran dimuka yang diharapkan akan terealisasi dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, diklasifikasikan sebagai aset lancar, selebihnya, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

j. Investasi dalam Saham yang Dikelompokkan dalam Aset Lepasan

Investasi dalam saham yang dikelompokkan dalam aset lepasan diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Investasi dalam saham yang dikelompokkan dalam aset lepasan harus diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut.

Kondisi ini dapat terpenuhi hanya ketika investasi dalam saham yang dikelompokkan dalam aset lepasan berada dalam keadaan segera dapat dijual dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus berkomitmen terhadap rencana penjualan tersebut, yang diperkirakan memenuhi ketentuan pengakuan sebagai penjualan dalam waktu satu tahun dari tanggal klasifikasi.

k. Aset Tetap dan Penyusutan

Pemilikan Langsung

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan pada tahun 2017, semula dicatat berdasarkan metode biaya perolehan, menjadi metode revaluasi, yang dihitung oleh penilai independen. Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan dengan tujuan agar Laporan Keuangan Konsolidasian dapat menggambarkan investasi Perusahaan dan Entitas Anak dalam aset tetap kelompok tanah dan bangunan dan perubahan dalam investasi tersebut sesuai dengan nilai pasar pada periode Laporan Keuangan Konsolidasian (Catatan 10).

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset tetap yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat berasal dari revaluasi dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi nilai saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset Tetap dan Penyusutan (lanjutan)

Aset tetap pemilikan langsung kecuali tanah disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai aset, jika ada dan disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus (Straight-line) dengan taksiran masa manfaat keekonomian aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan Permanen	20
Kendaraan	4 - 8
Perabotan dan Peralatan	4 - 8

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Semua pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Secara berkala, nilai residu, metode penyusutan dan masa manfaat setiap aset ditelaah, dan disesuaikan jika perlu.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui dalam akun "(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih" di laba rugi.

Aset Tetap dalam Pembangunan

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan, dan penyusutan mulai dibebankan pada saat itu.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset keuangan

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan ditentukan berdasarkan jenis aset. Untuk aset keuangan berupa instrumen utang, pengklasifikasiannya harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- a) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kedaluwarsa atau dialihkan dan Grup telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Berikut adalah kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/ (kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laba rugi.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laba rugi.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Aset keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Pada 31 Maret 2024 dan Desember 2023, Grup telah memilih untuk mengukur seluruh aset keuangan instrumen ekuitas pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. Perubahan nilai wajar aset keuangan tersebut dicatat pada akun penghasilan komprehensif lain di bagian ekuitas pada neraca dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat dihentikan pengakuannya.

(ii) Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Ketika aset keuangan instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dihentikan pengakuannya, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

(iii) Saling hapus antar instrumen

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

m. Penurunan nilai dari aset keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis forward-looking untuk seluruh saldo piutang usaha. Selain untuk piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Grup menilai berdasarkan basis forward-looking untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

o. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode Akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar atau pun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung pada tahun berjalan.

Pada tanggal akuisisi, selisih lebih antara penjumlahan imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih (aset neto) dicatat sebagai goodwill. Jika imbalan lebih rendah dari nilai wajar aset neto dari Perusahaan yang diakuisisi maka selisihnya diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

Transaksi yang dilakukan dengan entitas sepengendali diterapkan metode Penyatuan Kepemilikan. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak menimbulkan laba rugi bagi seluruh kelompok usaha atau bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Selisih antara harga pengalihan dengan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali pada tanggal pengalihan dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

p. Pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah penilaian:

- a) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

- d) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan pelayanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa tambahan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar Garis Lurus selama masa sewa.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan yang diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Hotel

Pendapatan sewa hotel dan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat jasa diberikan atau barang diserahkan.

Pendapatan Spa

Pendapatan dari spa diakui pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

<u>Beban</u>

Beban diakui pada saat terjadi berdasarkan konsep akrual.

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian secara akrual menggunakan metode Suku Bunga Efektif.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan pada tanggal posisi keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya. Pajak penghasilan tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan dan yang diharapkan akan diterapkan pada saat aset pajak tangguhan yang bersangkutan direalisasi atau pada saat liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

r. Sewa

Suatu kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu yang dipertukarkan dengan imbalan. Entitas menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Aset hak-guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak-guna atau masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas sisa saldo liabilitas.

Grup tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- Sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Liabilitas manfaat karyawan

Entitas mengakui liabilitas atas imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. Nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu ditentukan dengan menggunakan metode penilaian "Projected Unit Credit".

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiunan yang bersangkutan.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

t. Aset dan liabilitas pengampunan pajak

Grup telah menerapkan PSAK 70 mengenai "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak". PSAK ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan deemed cost dan menjadi dasar bagi Grup dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Grup mengakui uang tebusan yang dibayarkan pada laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

u. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan Entitas Anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Asumsi kelangsungan usaha

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Perusahaan tetap dapat melangsungkan usahanya. laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul sebagai dampak dari ketidakpastian tersebut.

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. Dalam keadaan seperti itu, asumsi kelangsungan usaha Perusahaan dapat berubah.

Perusahaan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi, dan asumsi dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perusahaan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Rugi penurunan nilai piutang

Perusahaan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak dan investasi (capital allowance) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran capital allowance, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset non-keuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain; yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Kewajiban imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban imbalan pascakerja.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir tahun pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban imbalan pascakerja yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Penurunan nilai aset nonkeuangan dan aset tetap

Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas tingkat produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi Cadangan'), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga terdapat kemungkinan perubahan situasi yang dapat mengubah proyeksi ini, sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KAS DAN SETARA KAS

Rincian kas dan setara kas pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Kas	1.185.803.610	1.191.185.291
Kas di bank		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	2.063.988.988	3.286.422.236
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.467.255.350	1.345.086.215
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	258.899.291	367.256.876
PT Bank CIMB Niaga Tbk	140.326.916	105.026.388
PT Bank Pan Indonesia Tbk	16.541.208	16.629.744
PT Bank Bukopin Tbk	574.803	15.983.088
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	350.790.134
Subtotal Kas di Bank	3.947.586.556	5.487.194.681
Deposito Berjangka		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.130.000.000	3.130.000.000
PT Bank Capital	1.591.971.848	2.079.525.548
Subtotal Deposito	4.721.971.848	5.209.525.548
Jumlah	9.855.362.014	11.887.905.520

Deposito berjangka mempunyai jangka waktu 1 bulan dan memiliki tingkat bunga berkisar antara 5,25%-7,25% per tahun pada 31 Maret 2024 dan 4,25% - 4,85% per tahun pada 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 tidak terdapat bank yang dibatasi penggunaannya dan seluruh bank ditempatkan pada pihak ketiga.

PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas jasa penyewaan kamar hotel dan spa, berikut fasilitas dan penunjang lainnya dengan rincian per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pelanggan yang telah check out:		
Bank Bukopin	270.050.000	-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	152.040.000	10.500.000
Kepolisian Negara Republik Indonesia	78.633.866	-
PT Mitra Global Holiday	49.200.000	85.850.000
Sub Jumlah	549.923.866	96.350.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)		
a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerir	22.000.000	-
Online Travel Agent	19.156.145	4.423.704
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.425.000	-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	51.053.945
Lain-lain (Saldo di bawah Rp 10.000.000)	35.300.146	149.796.986
Sub jumlah pelanggan yang telah check out	636.805.157	301.624.635
Pelanggan yang belum check out	81.937.913	80.305.175
Kartu Kredit	550.000	15.801.790
Kartu Debit	31.798.579	3.849.550
Sub jumlah	751.091.649	401.581.150
Provisi atas penurunan nilai	(5.317.921)	(5.317.921)
Jumlah	745.773.728	396.263.229

b. Berdasarkan umur

Rincian piutang berdasarkan umur piutang per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kategori Umur	31 Maret 2024	31 Desember 2023
0 - 30 hari	596.497.053	323.935.750
31 - 60 hari	133.919.596	62.246.682
61 - 90 hari	-	15.398.718
> 90 hari	20.675.000	-
Total	751.091.649	401.581.150

Kolektibilitas piutang usaha pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Rata-rata Piutang usaha - Bersih	571.018.479	272.062.544
Penjualan	4.550.375.300	5.087.278.917
Kolektibilitas Piutang	45,80 hari	19,52 hari

Seluruh piutang usaha kepada pihak ketiga merupakan piutang kepada pelanggan dalam mata uang Rupiah serta tidak dikenakan jaminan dan bunga serta tidak digunakan sebagai jaminan kredit.

Mutasi provisi penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Saldo awal	5.317.921	212.052.810
Penambahan (pemulihan) Penyisihan	-	(206.734.889)
Saldo akhir	5.317.921	5.317.921

Manajemen berpendapat bahwa provisi penurunan nilai piutang lain-lain tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Karyawan	41.675.000	57.278.243
Piutang Bunga	1.041.248	1.106.144
Lain - lain	-	-
Sub Jumlah	42.716.248	58.384.387
Pihak berelasi (Catatan 12b)	2.008.239.877	2.008.239.877
Jumlah	2.050.956.125	2.066.624.264
Provisi atas penurunan nilai	-	-
Jumlah piutang lain-lain	2.050.956.125	2.066.624.264
Bagian lancar	42.716.248	58.384.387
Bagian tidak lancar	2.008.239.877	2.008.239.877
Jumlah	2.050.956.125	2.066.624.264

Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang kepada pelanggan dalam mata uang Rupiah serta tidak dikenakan jaminan dan bunga.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak perlu dilakukan cadangan kerugian penurunan nilai.

7. PERSEDIAAN

Rincian persediaan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Makanan	61.706.218	61.929.424
Minuman	54.565.012	60.102.109
Lain-lain	266.058.028	263.841.930
Jumlah	382.329.258	385.873.463

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban masing-masing sebesar Rp358.403.927 dan Rp370.576.250 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2024 dan 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik dari persediaan, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penyisihan atas keusangan persediaan karena Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat dijual atau digunakan sesuai dengan periode peruntukannya.

Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, persediaan tidak diasuransikan atas resiko kerugian, kebakaran dan bencana alam. Manajemen memahami adanya risiko yang terkait sehubungan dengan persediaan yang tidak diasuransikan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERLENGKAPAN

Rincian perlengkapan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Linen	1.121.887.602	1.134.506.918
Barang Pecah Belah	147.529.334	147.643.147
Perkakas, Alat, Bahan bakar dan supply	147.156.874	144.093.657
Perangkat Makan Perak	28.806.704	28.806.704
Seragam	9.350.919	9.350.919
Lain-lain	53.723.552	53.723.552
Jumlah	1.508.454.985	1.518.124.897

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian uang muka dan biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Uang muka:		
Uang muka pembelian	226.671.064	186.100.989
Uang muka karyawan	47.000.000	31.000.000
Lain-lain	-	9.656.300
Jumlah uang muka	273.671.064	226.757.289
Biaya dibayar dimuka		
Perijinan	463.087.786	115.313.596
Beban Tangguhan	286.782.682	-
Asuransi	151.340.612	204.631.658
Kontrak Service	82.402.177	48.294.102
Sewa	54.450.000	71.362.820
Lain-lain	-	16.079.017
Jumlah biaya dibayar dimuka	1.038.063.257	455.681.193
Jumlah	1.311.734.321	682.438.482
Bagian lancar	1.302.472.654	670.735.530
Bagian tidak lancar	9.261.667	11.702.952
Jumlah	1.311.734.321	682.438.482

Beban tangguhan adalah biaya THR, dan biaya-biaya operasional lainnya yang diamortisasi selama satu tahun.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

Rincian Aset tetap per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2024						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir Sebelum Revaluasi	Revaluasi (Penurunan Nilai)	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:							
Pemilikan Langsung							
Tanah	332.483.700.000	_	_	-	332.483.700.000	-	332.483.700.000
Bangunan	73.789.700.000	_	_	-	73.789.700.000	-	73.789.700.000
Kendaraan	8.373.340.022	-	_	_	8.373.340.022	_	8.373.340.022
Perabot dan peralatan	15.056.488.374	7.775.000	_	_	15.064.263.374	_	15.064.263.374
Jumlah Pemilikan Langsung	429.703.228.396	7.775.000			429.711.003.396		429.711.003.396
Aset Hak Guna							
Kendaraan	282.600.000				282.600.000		282.600.000
Jumlah Aset Hak Guna Aset Tetap dalam	282.600.000				282.600.000		282.600.000
Pembangunan	427.207.136	267.381.000			694.588.136		694.588.136
Jumlah	430.413.035.532	275.156.000			430.688.191.532		430.688.191.532
Akumulasi Penyusutan:							
Pemilikan Langsung							
Bangunan	-	1.388.161.730	-	-	1.388.161.730	-	1.388.161.730
Kendaraan	7.842.390.639	59.542.668	-	-	7.901.933.307	-	7.901.933.307
Perabot dan peralatan	13.220.130.379	173.560.851			13.393.691.230		13.393.691.230
Jumlah Pemilikan Langsung	21.062.521.018	1.621.265.249			22.683.786.267		22.683.786.267
Aset Hak Guna							
Kendaraan	23.550.000	8.831.250			32.381.250		32.381.250
Jumlah Aset Hak Guna	23.550.000	8.831.250			32.381.250		32.381.250
Nilai buku - bersih	409.326.964.514					;	407.972.024.015
				202	23		
					Saldo Akhir		
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Sebelum Revaluasi	Revaluasi (Penurunan Nilai)	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:							
Pemilikan Langsung							
Tanah							
	307.798.580.933	-	_	-	307.798.580.933	24.685.119.067	332.483.700.000
	307.798.580.933 84.623.631.725	-	-	-	307.798.580.933 84.623.631.725	24.685.119.067 (10.833.931.725)	332.483.700.000 73.789.700.000
Bangunan	84.623.631.725	-	- - 162.500.000	-	84.623.631.725	24.685.119.067 (10.833.931.725)	73.789.700.000
Bangunan Kendaraan	84.623.631.725 8.535.840.022	- - - 1.108.403.308	- - 162.500.000 91.500.000	- - - 373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022		73.789.700.000 8.373.340.022
Bangunan	84.623.631.725	1.108.403.308	- 162.500.000 91.500.000	- - - 373.051.834	84.623.631.725		73.789.700.000
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan	84.623.631.725 8.535.840.022	- - 1.108.403.308 1.108.403.308		- - - 373.051.834 373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022		73.789.700.000 8.373.340.022
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912		91.500.000 254.000.000		84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374	(10.833.931.725) - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232	1.108.403.308	91.500.000		84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054	(10.833.931.725) - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912		91.500.000 254.000.000		84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374	(10.833.931.725) - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000		84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054	(10.833.931.725) - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054	(10.833.931.725) - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000		84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054	(10.833.931.725) - - - 13.851.187.342 - - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 -
Bangunan Kendaraan Perabat dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 - 282.600.000	(10.833.931.725) - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan:	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 - 4.503.363.000 373.051.834	1.108.403.308 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 - 	(10.833.931.725) - - - 13.851.187.342 - - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 -
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan:	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 - 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746	1.108.403.308 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 1.818.210.444	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 416.561.848.190	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 -
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 - 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746	1.108.403.308 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 - 	(10.833.931.725) - - - 13.851.187.342 - - -	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 - 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746	1.108.403.308 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 1.818.210.444	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 416.561.848.190	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 - 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746	1.108.403.308 282.600.000 282.600.000 427.207.136 1.818.210.444 4.624.929.000	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000 - 4.757.363.000 - 162.500.000 91.500.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 416.561.848.190	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 430.413.035.532
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 - 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746 19.638.025.715 7.766.719.969	1.108.403.308 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 1.818.210.444 4.624.929.000 238.170.670	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000 - 4.757.363.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 430.413.035.532 - 7.842.390.639
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Kendaraan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746 19.638.025.715 7.766.719.969 12.800.615.025 40.205.360.709	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000 - 4.757.363.000 - 162.500.000 91.500.000 254.000.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 430.413.035.532 7.842.390.639 13.220.130.379
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746 19.638.025.715 7.766.719.969 12.800.615.025	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000 - 4.757.363.000 - 162.500.000 91.500.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 430.413.035.532 7.842.390.639 13.220.130.379
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746 19.638.025.715 7.766.719.969 12.800.615.025 40.205.360.709	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000 - 4.757.363.000 - 162.500.000 91.500.000 254.000.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054 	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 - 282.600.000 282.600.000 427.207.136 430.413.035.532 7.842.390.639 13.220.130.379
Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan Kendaraan Aset Tetap dalam Pembangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan: Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Perabot dan peralatan Jumlah Pemilikan Langsung Aset Hak Guna Bangunan	84.623.631.725 8.535.840.022 13.666.533.232 414.624.585.912 4.503.363.000 4.503.363.000 373.051.834 419.501.000.746 19.638.025.715 7.766.719.969 12.800.615.025 40.205.360.709	1.108.403.308	91.500.000 254.000.000 4.503.363.000 - 4.503.363.000 - 4.757.363.000 - 162.500.000 91.500.000 254.000.000	373.051.834	84.623.631.725 8.373.340.022 15.056.488.374 415.852.041.054	(10.833.931.725)	73.789.700.000 8.373.340.022 15.056.488.374 429.703.228.396 282.600.000 282.600.000 427.207.136 430.413.035.532 7.842.390.639 13.220.130.379 21.062.521.018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Tanah milik Perusahaan dan Entitas Anak merupakan tanah yang berlokasi di Jakarta Pusat (Pejompongan), Jakarta Selatan (Falatehan dan Pondok Pinang), Kepulauan Seribu, NTT (Tanjung Karoso) dan Bali (Canggu) dengan total area seluas masing-masing seluas 1.175.063m2 pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Atas tanah di Kepulauan Seribu, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 8 Mei 2015 dengan PT Setia utama Island atas pembelian sebuah villa dengan total area seluas 1.500 m2 yang berlokasi di Pulau Tengah, Kepulauan Seribu dengan harga beli sebesar Rp15.800.000.000. Aset tersebut telah diserah terima dengan baik oleh Perusahaan melalui berita acara serah terima dengan PT Setia utama Island. Sampai saat ini, akta jual beli masih dalam proses karena harus menunggu proses pemecahan sertifikat induk oleh penjual.

Tanah, bangunan dan perabotan dan peralatan yang berlokasi di Jalan Falatehan I No.21-22, Melawai, Jakarta Selatan (Sotis Falatehan) dan di Jalan Raya Kayu Tulang, Desa Canggu (Sotis Villa Canggu) digunakan oleh PT Dwimukti Mitra Wisata (Entitas Anak) untuk menjalankan kegiatan usaha perhotelan. Pada tahun 2023 dan 2022, tanah dan bangunan di Jalan Falatehan tersebut dijadikan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman bank yang diperoleh Entitas Anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 17).

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek pembangunan fasilitas pendukung hotel yang masih dalam tahap penyelesaian.

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	1.630.096.499	5.397.665.026
Jumlah	1.630.096.499	5.397.665.026

Selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp18.647.077.706 dan Rp18.257.669.006 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.

Aset tetap tidak termasuk tanah telah diasuransikan terhadap risiko akibat kerusakan, bencana alam, kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp75.608.702.676 pada per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023. Manajemen akan meningkatkan nilai pertanggungan tersebut untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi.

Analisis laba (rugi) terkait yang timbul dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Harga jual	-	113.120.000
Nilai buku	<u> </u>	<u>-</u>
Laba atas penjualan aset tetap	-	113.120.000

Perusahaan telah melakukan penilaian kembali aset tetap pada tahun 2023 dengan Laporan No. 00068/2.0004-14/PI/03/0595/1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 oleh KJPP Pung's Zulkarnain dan Rekan yang ditandatangani oleh Ir. Aguson Rosano. MAPPI (Cert.) Laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal. Penilaian kembali aset tetap untuk tanah pada tanggal 31 Desember 2023 hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.16 tentang "Aset Tetap" dan tidak ditujukan untuk tujuan pajak. Penentuan nilai wajar dilakukan dengan metode pendekatan biaya.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2023					
No.	Lokasi	Alamat Aset	Jenis Aset	Nilai Wajar	Metode Pendekatan	
1.	Jakarta	Jl. Falatehan I No. 21-22 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Tanah (523 m2) Bangunan (3.020 m2)	36.262.200.000 21.744.000.000	Pendekatan Biaya dan Pendapatan	
2.	Jakarta	Jl. Penjernihan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Tanah (501 m2) Bangunan (2.974 m2)	29.904.700.000 19.925.800.000	Pendekatan Biaya dan Pendapatan	
3.	Jakarta	Jl. Pinang Kuningan I No.25 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Tanah (3.027 m2)	60.181.200.000	Pendekatan Pasar	
4.	Jakarta	Lexington Apartement L : 26-06, Jl. Deplu Raya No. 12, Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan	Bangunan - Apartemen Lexington (68 m2)	2.020.600.000	Pendekatan Pasar	
		Lexington Apartement L : 26-08, Jl. Deplu Raya No. 12, Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan	Bangunan - Apartemen Lexington (76 m2)	2.279.400.000	Pendekatan Pasar	
5.	Jakarta	Pulau Tengah Kav. 51, Pulau Pari, Pulau Seribu Selatan, Kep. Seribu	Tanah (1.500 m2)	18.761.600.000	Pendekatan Biaya dan Pendapatan	
			Bangunan (1.677 m2)	17.608.500.000		
6.	Sumba Barat Daya, Nusa	Desa Tanjung Karoso, Kec. Kodi, Kab. Sumba Barat Nusa Tenggara Timur	Tanah (1.162.282 m2)	135.615.700.000	Pendekatan Pendapatan	
7.	Canggu, Bali	Jalan Raya Kayutulang, Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab.	Tanah (7.230 m2) Bangunan (1.674 m2) Jumlah	51.758.300.000 10.211.400.000 406.273.400.000	Pendekatan Biaya dan Pendapatan	

Surplus revaluasi aset tetap diikhtisarkan sebagai berikut:

	Nilai Buku			
Jenis	Nilai Wajar	Sebelum Revaluasi	Surplus Revaluasi	
Tanah	332.483.700.000	307.798.580.933	24.685.119.067	
Bangunan	73.789.700.000	60.360.677.009	13.429.022.991	
Jumlah	406.273.400.000	368.159.257.942	38.114.142.058	

Mutasi surplus revaluasi aset tetap untuk 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
183.875.074.658	154.855.264.313	154.855.264.313
-	38.114.142.058	-
	(709.220.460)	-
183.875.074.658	192.260.185.911	154.855.264.313
-	(8.385.111.253)	-
183.875.074.658	183.875.074.658	154.855.264.313
	183.875.074.658 - 183.875.074.658	183.875.074.658

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, berdasarkan evaluasi atas kondisi aset pada tanggal-tanggal tersebut.

11. ASET LAIN-LAIN

Rincian aset lain-lain per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.200.000.000	1.200.000.000
Jumlah	1.200.000.000	1.200.000.000

Kas yang di batasi penggunaannya adalah uang jaminan sehubungan dengan pinjaman kredit investasi BNI, yang dapat digunakan ketika hutang sudah lunas.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak berelasi.

Sifat Pihak Berelasi

Hubungan dan jenis akun atau transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
1.	Herman Herry Adranacus	Pemegang Saham dan Komisaris Utama di Entitas Anak	Utang lain-lain
2.	Vonny Kristiani	Pemegang Saham Perusahaan dan Entitas Anak serta Komisaris Entitas Anak	Piutang lain-lain
3.	Cindy Angelina Adranacus	Pemegang Saham Perusahaan	Piutang lain-lain; Utang lain-lain
4.	PT Dwimukti Graha Elektrindo	Di bawah pengendali yang sama dengan Perusahaan dan Entitas Anak	Piutang lain-lain; Utang lain-lain
5.	PT Dwimukti Inti Boga	Di bawah pengendali yang sama dengan Perusahaan dan Entitas Anak	Piutang lain-lain; Utang lain-lain
6.	PT Sotis Hotel Manajemen	Di bawah pengendali yang sama dengan Perusahaan dan Entitas Anak	Piutang lain-lain; Utang lain-lain
7.	PT Sungai Mas Propertindo	Di bawah pengendali yang sama dengan Perusahaan dan Entitas Anak	Piutang lain-lain
8.	Stevano Rizki Adranacus	Komisaris Utama	Utang lain-lain

b. Piutang lain-lain

Rincian piutang lain-lain kepada pihak berelasi per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Entitas	31 Maret 2024	31 Desember 2023
PT Sungai Mas Propertindo	1.595.447.266	1.595.447.266
PT Dwimukti Inti Boga	230.046.000	230.046.000
Vonny Kristiani	182.746.611	182.746.611
Jumlah piutang lain-lain Pihak Berelasi	2.008.239.877	2.008.239.877
Provisi atas penurunan nilai	-	-
Jumlah	2.008.239.877	2.008.239.877

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Piutang lain-lain (lanjutan)

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Bagian lancar	-	-
Bagian tidak lancar	2.008.239.877	2.008.239.877
Jumlah	2.008.239.877	2.008.239.877
Persentase terhadap jumlah aset	0,47%	0,46%

c. Utang lain-lain

Rincian utang lain-lain kepada pihak berelasi per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Entitas	31 Maret 2024	31 Desember 2023
PT Dwimukti Graha Elektrindo	91.939.800.685	88.269.800.685
Herman Herry Adranacus	5.627.698.483	5.627.698.483
Stevano Rizki Adranacus	1.380.000.000	1.380.000.000
PT Sotis Hotel Manajemen	1.058.031.000	935.707.000
PT Dwimukti Inti Boga	1.166.287.750	804.750.000
Jumlah	101.171.817.918	97.017.956.168
Bagian lancar	2.224.318.750	1.740.457.000
Bagian tidak lancar	98.947.499.168	95.277.499.168
Jumlah	101.171.817.918	97.017.956.168
Persentase terhadap jumlah liabilitas	45,09%	43,58%

Transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

PT Dwimukti Graha Elektrindo ("DGE")

Pada tahun 2024, Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh tambahan dana dari DGE untuk operasional sehingga saldo utang per 31 Maret 2024 menjadi sebesar Rp91.939.800.685 terdiri dari saldo utang PT SMK sebesar Rp10.441.864.479, PT DMW sebesar Rp79.387.419.658 dan saldo utang PT TKP sebesar Rp 2.110.516.548.

Pada tahun 2023, Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh tambahan dana dari DGE untuk operasional sehingga saldo utang per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp88.269.800.685 terdiri dari saldo utang PT SMK sebesar Rp10.441.864.479, PT DMW sebesar Rp75.717.419.658 dan saldo utang PT TKP sebesar Rp 2.110.516.548.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Dwimukti Graha Elektrindo ("DGE") (lanjutan)

a. SMK

Berdasarkan perjanjian utang piutang Nomor 042/PHP/I/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan ke empat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 060/PPHP-IV/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan mengakui menerima pinjaman dari DGE sebesar Rp16.072.774.169 sebagai tambahan modal/modal kerja dan/atau keperluan operasional Perusahaan. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tanpa jangka waktu pengembalian yang pasti. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan akan membayar pinjaman tersebut secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan arus kas Perusahaan. Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan, DGE dan PT Dwimukti Mitra Wisata (DMW) menandatangani perjanjian novasi (Catatan 11b) untuk mengalihkan saldo utang lain-lain Perusahaan kepada DGE sebesar Rp12.527.470.050 menjadi bagian dari saldo utang lain-lain Perusahaan kepada DMW. Setelah novasi tersebut, sisa saldo pinjaman Perusahaan kepada DGE adalah sebesar Rp3.545.304.119 per 31 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 28 Desember 2018, Perusahaan dan DGE menandatangani Perubahan Keempat Perjanjian Utang Piutang No.082/PPHP-III/V/2018 dan No.153/PPHPIV/XII/2018 dimana Perusahaan mengakui dan menerima pinjaman dari DGE per tanggal perjanjian masing-masing sebesar Rp4.153.781.850 dan Rp32.894.177.830. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan, DGE dan DMW menandatangani perjanjian novasi untuk mengalihkan saldo utang lain-lain Perusahaan kepada DGE sebesar Rp28.740.395.980 menjadi bagian dari saldo utang lain-lain Perusahaan kepada DMW. Setelah saldo tersebut, sisa saldo pinjaman Perusahaan kepada DGE adalah sebesar Rp4.153.781.850 per 31 Desember 2018.

Perusahaan menerima pinjaman dari waktu ke waktu dari DGE dan telah melaksanakan pembayaran atas pinjaman tersebut kepada DGE. Pada tanggal 31 Desember 2023 sisa saldo pinjaman Perusahaan kepada DGE adalah sebesar Rp10.441.864.479. Atas saldo sisa hutang tersebut telah dinyatakan dalam Addendum Perjanjian Utang Piutang No.289/PHP/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow Perusahaan.

b. DMW

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No.147/PHP/XII/2016 antara DMW (Entitas Anak) dengan DGE tanggal 28 Desember 2016, DGE setuju untuk memberikan pinjaman kepada DMW sebagai tambahan modal/modal kerja dan atau keperluan operasional DMW dengan nilai sebanyakbanyaknya sebesar Rp11.000.000.000 yang dapat diterima secara sekaligus ataupun secara bertahap. Atas pinjaman tersebut, tidak dikenakan bunga dan dibayarkan kembali secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan keuangan DMW.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan melalui Penegasan Perjanjian Utang Piutang No.149/PPHP/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, dimana DMW mengakui utang kepada DGE sebesar Rp10.825.825.978.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Dwimukti Graha Elektrindo ("DGE") (lanjutan)

b. DMW (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No.150/PHP/XII/2017 antara DMW dengan DGE tanggal 28 Desember 2017, DMW setuju untuk memberikan pinjaman kepada DGE sebagai tambahan modal/modal kerja dan atau keperluan operasional DGE sebesar Rp66.693.458.803. Atas pinjaman tersebut, tidak dikenakan bunga dan dibayarkan kembali secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan keuangan DGE.

Atas kedua Perjanjian Utang Piutang di atas (No.149/PPHP/XII/2017 dan No.150/PHP/XII/2017), DMW dan DGE membuat Perjanjian Perjumpaan Utang (Kompensasi) pada tanggal 28 Desember 2017, dimana kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjumpaan utang/kompensasi antara saldo utang DGE kepada DMW sebesar Rp66.693.458.803 dengan saldo utang DMW kepada DGE sebesar Rp10.825.825.978 sehingga saldo akhir utang DGE kepada DMW menjadi sebesar Rp55.867.632.824.

Sehubungan dengan Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) antara Perusahaan, DMW dan DGE, dimana DGE bermaksud melunasi sebagian utangnya kepada DMW dengan jalan Perusahaan menyatakan mengakui utang kepada DMW sejumlah Rp12.527.470.050 maka atas novasi tersebut, saldo utang DGE kepada DMW yang sebelumnya sebesar Rp55.867.632.824 setelah dikurangi nilai utang di dalam novasi sebesar Rp12.527.470.050 maka akan menjadi sebesar Rp43.340.162.774.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 29 Desember 2017 antara DMW dengan DGE, dimana atas nilai sisa utang DGE kepada DMW sebesar Rp43.340.162.774 ("Sisa Utang") akan dilunasi oleh DGE dengan cara menjual kepada DMW sebidang tanah yang terletak di daerah Propinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang yang dikenal sebagai Jalan Pinang Kuningan I sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.09017/Pondok Pinang tertanggal 21 November 2017 seluas 3.239m2 yang terdaftar atas nama DGE. Harga Jual Beli yang disepakati adalah sebesar Rp54.122.438.057 yang pembayarannya dilakukan secara bertahap oleh DMW dengan cara sebagai berikut:

- 1. Sejumlah sisa utang diakui sebagai pembayaran uang muka oleh DMW kepada DGE atas pembelian tanah pada saat tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.
- Sebesar Rp10.782.275.282 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2018 yang akan diikuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli.

Atas nota kesepahaman di atas, DMW mencatat saldo masing-masing sebesar Rp43.340.162.774 sebagai Uang Muka Pembelian Tanah pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2017.

Pada tahun 2018, DMW memperoleh pinjaman dari DGE dengan total sebesar Rp11.733.332.653 per 31 Desember 2018 yang tertuang di dalam perubahan kedua Perjanjian Utang Piutang No. 166/PPHP-II/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan) PT Dwimukti Graha Elektrindo ("DGE") (lanjutan)

b. DMW (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, sesuai dengan Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) antara DGE, DMW dan Perusahaan, bahwa Perusahaan bermaksud mengalihkan sebagian utangnya dengan DGE menjadi utang kepada DMW dan DMW ingin melunasi sebagian utangnya kepada DGE dengan memperhitungkan uang muka pembelian tanah Pondok Pinang sehingga jumlah pinjaman adalah sebagai berikut:

- Saldo utang Perusahaan kepada DGE sebesar Rp28.740.395.980 telah dialihkan menjadi utang kepada DMW. Saldo utang Perusahaan kepada DMW per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp68.832.147.811 dan saldo utang Perusahaan kepada DGE per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.153.781.850.
- Saldo uang muka pembelian tanah Pondok Pinang sebesar Rp43.340.162.774 diperhitungkan dengan utang DMW kepada DGE sebesar Rp11.733.332.653 dan pengalihan atas utang Perusahaan kepada DGE yang diterima oleh DMW yaitu sebesar Rp28.740.395.980 sehingga saldo uang muka pembelian tanah Pondok Pinang per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.866.434.141.

Pada tanggal 30 Desember 2022 dibuat Penegasan Nota Kesepahaman antara DMW dengan DGE untuk melakukan Addendum II atas Nota Kesepahaman dimana para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan dan menegaskan kembali pasal 2 pada MOU, sebagai berikut:

- 1. Sisa utang sebesar Rp2.866.434.141 diakui oleh DGE sebagai pembayaran uang muka oleh DMW kepada DGE atas pembelian tanah Pondok Pinang.
- 2. Sisa pembayaran sebesar Rp51.224.865.859 akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2024 yang diikuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli.
- 3. Semua syarat dan ketentuan hutang piutang sebagaimana dinyatakan dan ditetapkan dalam Perjanjian terdahulu yang telah ada, selama tidak dinyatakan berubah dalam Penegasan Perjanjian, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Pada tahun 2023, uang muka yang diberikan oleh DMW senilai Rp2.866.434.141 sesuai dengan adendum nota kesepahaman tahun 2022 dikompensasikan menjadi pembayaran utang DMW kepada DGE. Yang berarti DMW tidak menjadi membeli tanah Pondok Pinang dan tidak terdapat sisa pembayaran yang harus dibayar oleh DMW.

DMW menerima pinjaman dari waktu ke waktu dari DGE dan telah melaksanakan pembayaran atas pinjaman tersebut kepada DGE. Pada tanggal 31 Desember 2023 sisa saldo pinjaman Perusahaan kepada DGE adalah sebesar Rp75.717.419.658. Atas saldo sisa hutang tersebut telah dinyatakan dalam Addendum II Perjanjian Utang Piutang No.284/DGE-DMW/PHP/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow DMW.

Saldo piutang lain-lain DGE per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.033.100 merupakan sisa saldo piutang atas transaksi penjualan kendaraan Perusahaan kepada DGE. Atas saldo sisa piutang tersebut telah dinyatakan dalam 284/DGE-DMW/PHP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023. Piutang tersebut diberikan dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow DGE.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan) PT Dwimukti Graha Elektrindo ("DGE") (lanjutan)

c. TKP

Berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.284/PHP/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022 TKP (Entitas Anak) mengakui dan menerima pinjaman dari DGE sebesar Rp2.110.516.548. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow TKP.

Vonny Kristiani ("VK")

a. SMK

Saldo piutang lain-lain VK per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp182.746.611. Merupakan sisa saldo piutang atas transaksi pinjaman yang diberikan dari waktu ke waktu. Atas saldo sisa pinjaman tersebut telah dinyatakan dalam Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) No.280/SMK-VK/PHP/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023. Piutang tersebut diberikan dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminiam.

Herman Herry Adranacus ("HHA")

a. DMW

Saldo utang lain-lain Perseroan dan entitas anak kepada HHA per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5.627.698.483.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No.041/PPS/I/2015 tanggal5 Januari 2015 antara DMW dengan HHA (Pihak pertama) ,dimana pihak pertama setuju untuk memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000 yang dapat diterima sekaligus ataupun secara bertahap. Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan dibayarkan kembali setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan keuangan DMW. Saldo utang DMW per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 3.712.180.219.

Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali yaitu sebagai berikut:

- 1. Penegasan Pertama No.046/PPPS/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp3.712.180.219. Saldo utang DMW per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 3.712.180.219.
- 2. Penegasan Kedua No.046/PPPS/I/2017 tanggal 5 Januari 2017, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp3.712.180.219. Saldo utang DMW per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.712.180.219.
- 3. Perubahan Perjanjian Utang Piutang No.071B/PPHP/XII/2018 tanggal 31 Mei 2018, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp6.627.698.483. Saldo utang DMW per 31 Mei 2018 sebesar Rp 6.627.698.483.
- Penegasan Perjanjian Utang Piutang No.128/PPPS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp6.627.698.483. Saldo utang DMW per 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.627.698.483.
- Penegasan Perjanjian Utang Piutang No.185A/PPPS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp6.627.698.483. Saldo utang DMW per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.627.698.483.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan)

Herman Herry Adranacus ("HHA") (lanjutan)

- a. DMW (lanjutan)
 - Penegasan Perjanjian Utang Piutang No.285/PHP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp6.627.698.483. Saldo utang DMW per 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.627.698.483.
 - Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) No.279/HH-DMW/PHP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, dimana DMW mengakui utang kepada pihak pertama sebesar Rp5.627.698.483. Saldo utang DMW per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.627.698.483.

Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan dibayarkan kembali setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan keuangan DMW.

PT Sotis Hotel Manajemen ("SHM")

Saldo piutang lain-lain per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp 0. Sementara saldo utang lain-lain Perseroan dan entitas anak kepada SHM adalah senilai Rp1.058.031.000 dan Rp935.707.000

a. DMW

Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.193a/PHP/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2021 SHM mengakui dan menerima pinjaman dari DMW. Pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan operasional SHM dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminjam.

Sisa piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.017.457 yang dicatat sebagai bagian dari piutang lain-lain.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Hutang Piutang No.281/SHM-DMW/PHP/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 DMW telah menerima pinjaman dari SHM dari waktu ke waktu dan saat perjanjian pada saat perjanjian ditandatangani total pinjaman adalah sebesar Rp935.707.000.

Adapun perincian jumlah pinjaman tersebut sebagai berikut:

- 1. Pinjaman untuk dana operasional sebesar Rp 385.707.000.
- Biaya Jasa Manajemen (Management Fee) yang belum dibayar atas pengoperasian Sotis Hotel sebesar Rp550.057.000. Terhadap biaya Jasa Manajemen (Management Fee) ini tidak dikenakan biaya tambahan berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan pembayaran yang belum dilakukan oleh DMW.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Sotis Hotel Manajemen ("SHM") (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Manajemen Hotel No.0012/CTR/SHM/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 antara Entitas Anak (PT Dwimukti Mitra Wisata) dengan PT Sotis Hotel Manajemen (SHM), bahwa Entitas Anak bermaksud menggunakan merk Sotis, sistem manajemen serta jasa pengelolaan hotel dari SHM. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama periode 2 tahun mulai dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2020. Atas perjanjian ini, Entitas Anak membayar biaya pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari incentive management fee sebesar Rp70.000.000 setiap bulan untuk masing-masing hotel. Selain itu, Entitas Anak wajib mencadangkan 3% dari GOP (Gross Operating Profit) hotel setiap bulannya sebagai cadangan untuk penggantian, penambahan dan penyempurnaan alat terpasang dan perlengkapan hotel.

Pada tahun yang berakhir tgl 31 Maret 2024 dan 2023, Entitas Anak membayar jasa manajemen kepada SHM masing-masing sebesar Rp450.000.000 yang dicatat sebagai "Jasa Manajemen" sebagai bagian dari Beban Umum dan Administrasi (Catatan 27).

Stevano Rizki Adranacus ("SRA")

Per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, saldo piutang Perusahaan dan entitas anak kepada SRA sebesar Rp1.380.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.194a/PHP/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 DMW mengakui dan menerima pinjaman dari SRA sebesar Rp1.380.000.000. Pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan operasional DMW dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminjam.

PT Dwimukti Inti Boga ("DIB")

Per 31 Maret 2024, saldo utang Perusahaan dan entitas anak kepada DIB sebesar Rp1.166.287.750 terdiri dari saldo utang SMK 258.537.750, DMW sebesar Rp186.750.000, dan TKP sebesar Rp721.000.000.

Per 31 Desember 2023, saldo utang Perusahaan dan entitas anak kepada DIB sebesar Rp804.750.000 terdiri dari saldo utang DMW sebesar Rp186.750.000 dan TKP sebesar Rp618.000.000.

a. DMW

Berdasarkan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No.282/DIB-DMW/PHP/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 DMW mengakui dan menerima pinjaman dari DIB sebesar Rp186.750.000. Pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan operasional DMW dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminjam.

b. TKP

Berdasarkan Perjanjian Hutang Pemegang Saham No. 291/DIB-TKP/PHP/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 Perusahaan mengakui dan menerima pinjaman dari DIB sebesar Rp618.000.000. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminjam. Pinjaman berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan atau ketika hutang tersebut dilunasi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Sungai Mas Propertindo ("SMP")

Per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, saldo piutang Perusahaan dan entitas anak kepada SMP sebesar Rp1.595.447.266.

Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang No.191a/PHP/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021 SMP mengakui dan menerima pinjaman dari DMW sebesar Rp1.100.000.000. Pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan operasional SMP dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminjam.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.287/PHP/XII/2023 tertanggal 30 Desember 2022 SMP mengakui dan menerima pinjaman dari DMW sebesar Rp1.595.447.266. Pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan operasional SMP dengan bunga 0% (nol persen) per tahun dengan tanpa biaya tambahan lainnya. Pembayaran pinjaman dilaksanakan secara bertahap setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan cash flow pihak peminjam.

13. UTANG USAHA

a. Berdasarkan nama Entitas

Rincian utang usaha berdasarkan nama pemasok per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
Sari Alam Supplier	167.849.137	115.621.350
CV Jasa Boga Niaga	37.608.800	13.516.500
PT Rumah Duta Pangan	28.084.975	21.100.195
Mallio Pastry	20.533.480	14.284.830
PT Trigian Prima Kasih	20.465.000	-
PT Fitra Food International	20.369.877	13.140.070
PT Sentral Sari Prima Sentosa	16.505.000	18.130.000
Makmur Stand Buah	16.138.500	21.442.500
PT Cikarang Primatex	13.153.316	6.014.240
Jayasegar Berkat Mandiri	12.922.000	-
Jeng Rince Kitchen	12.591.000	14.016.500
CV Bintang Jaya	11.925.000	5.120.000
CV Cynthia Rama Jaya	10.677.500	-
CV Cynthia Rama Jaya	10.641.533	-
Sukanda Djaya	10.243.595	9.562.100
Pratama Laundry & Dry Cleaning	8.851.600	11.603.300
Sumber Gizi Utama	6.829.350	5.920.350
CV Maju Bersama Meat Shop	5.397.750	14.064.450
PT Sari Tirta Indonesia	3.000.000	13.000.000
Lain-lain (Saldo dibawah Rp10.000.000)	205.000.170	195.651.698
Jumlah	638.787.583	492.188.083

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur

Rincian utang usaha dikategorikan berdasarkan tanggal tertagih adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
0 - 30 hari	335.149.964	268.274.983
31 - 60 hari	137.058.889	111.783.123
61 - 90 hari	46.319.048	30.654.100
> 90 hari	120.259.682	81.475.877
Jumlah	638.787.583	492.188.083

Seluruh utang usaha kepada pihak ketiga merupakan utang kepada pemasok dalam mata uang Rupiah per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023. Seluruh utang usaha berjangka waktu 30 sampai dengan 120 hari dan tanpa jaminan.

14. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Aktuaria Arya Bagiastra	5.722.500	-
Otoritas Jasa Keuangan	4.950.000	-
PT Asuransi Central Asia	-	155.418.514
Lainnya	3.020.994	2.208.498
Sub Jumlah	13.693.494	157.627.012
Pihak berelasi (catatan 12d)	101.171.817.918	97.017.956.168
Jumlah	101.185.511.412	97.175.583.180
Bagian lancar	2.238.012.244	1.898.084.012
Bagian tidak lancar	98.947.499.168	95.277.499.168
Jumlah	101.185.511.412	97.175.583.180

Seluruh utang lain-lain kepada pihak berelasi dilakukan tanpa dikenakan bunga, tanpa jaminan dan jatuh tempo sewaktu-waktu.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Jasa Pelayanan	528.514.291	561.280.204
Kerusakan dan Penggantian	294.379.746	281.892.500
Komisi	106.398.240	88.930.114
Jasa Profesional	95.000.000	95.000.000
Gaji dan Tunjangan	80.689.634	282.652.632
Listrik & Air	61.694.490	86.743.442
Kontrak Service	48.383.678	39.391.621
Cadangan Penggantian Perlengkapan Inventaris Hotel	35.452.545	-
Lain-lain	340.744.067	408.496.114
Jumlah	1.591.256.691	1.844.386.627

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Rincian pajak dibayar dimuka per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
<u>Perusahaan</u>		
PPN	4.727.838.276	4.776.330.887
Entitas anak		
Pasal 21	986.652	986.652
Pasal 23	1.243.637	510.000
Jumlah	4.730.068.565	4.777.827.539

b. Utang pajak

Rincian utang pajak per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
<u>Perusahaan</u>	 -	
Pasal 21	121.680.370	120.757.674
Pasal 23	151.576	823.524
Pasal 4 (2)	-	140.024
Denda	-	200.000
Entitas anak		
Pasal 29	551.751.481	551.751.481
Pajak pembangunan 1	189.165.940	237.802.028
Pasal 21	30.473.645	19.386.222
Pasal 23	3.928.513	4.632.482
Pasal 4(2)	66.000.000	-
Jumlah	963.151.525	935.493.435
Julillali	903.131.323	933.493.433

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

Rugi fiskal Perusahaan dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak untuk periode lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Namun, Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan tidak akan memiliki laba kena pajak yang mengakibatkan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat digunakan sebelum tanggal kadaluarsanya, sehingga aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut tidak diakui.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal Perusahaan diatas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Perseroan tidak melakukan perhitungan beban (manfaat) pajak penghasilan pada laporan keuangan interim. Perhitungan beban (manfaat) pajak penghasilan akan dilakukan secara tahunan yaitu pada laporan keuangan kuartal 4.

Berikut adalah kompensasi fiskal yang dimiliki oleh Perseroan :

31 Maret 2024	31 Desember 2023
-	(12.050.577.866)
(8.273.978.141)	(8.273.978.141)
(8.912.287.273)	(8.912.287.273)
(9.302.166.990)	(9.302.166.990)
(8.167.893.601)	(8.167.893.601)
(34.656.326.005)	(46.706.903.871)
	(8.273.978.141) (8.912.287.273) (9.302.166.990) (8.167.893.601)

Rugi fiskal Perusahaan dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak untuk periode lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Namun, Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan tidak akan memiliki laba kena pajak yang mengakibatkan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat digunakan sebelum tanggal kadaluarsanya, sehingga aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut tidak diakui.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak final dan pajak penghasilan konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal Perusahaan diatas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut komersial dengan ketentuan pajak. Perseroan tidak menghitung aset / liabilitas pajak tangguhan pada laporan keuangan interim, Berikut adalah rrincian perhitungan pajak tangguhan pada periode Desember 2023:

	2023			
	1 Januari 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke Iaporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2023
Perusahaan				
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih				
Aset Tetap	(19.829.324.592)	(50.284.866)	(6.384.745.853)	(26.264.355.311)
Imbalan kerja	241.669.221	38.940.668	18.073.784	298.683.673
Jumlah	(19.587.655.371)	(11.344.198)	(6.366.672.069)	(25.965.671.638)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

rajak ranggunan (lanjulan)			2023	
	1 Januari 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2023
Entitas Anak				
Aset Pajak Tangguhan - Bersih				
Aset Tetap	1.952.960.121	10.564.490	-	1.963.524.611
Cadangan penurunan piutang	46.651.660	(45.481.497)	-	1.170.163
Imbalan kerja	75.181.379	(39.818.555)	(662.030)	34.700.794
Amortisasi	(114.235.880)	23.160.084	-	(91.075.796)
Cadangan FF&E	43.799.140	(43.799.140)	-	-
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	2.004.356.420	(95.374.618)	(662.030)	1.908.319.772
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih				
Aset Tetap	(25.547.185.400)	-	(2.000.365.400)	(27.547.550.800)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(25.547.185.400)	-	(2.000.365.400)	(27.547.550.800)
<u>Konsolidasian</u>				
Aset Pajak Tangguhan				
Entitas Anak :				
PT Dwimukti Mitra Wisata	2.004.356.420			1.908.319.772
Liabilitas Pajak Tangguhan				
Perusahaan	(19.587.655.371)			(25.965.671.638)
Entitas Anak :				
PT Tanjung Karoso Permai	(25.547.185.400)			(27.547.550.800)
	(45.134.840.771)			(53.513.222.438)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		(106.718.816)	(8.367.699.499)	

e. Pengampunan Pajak

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan dan Entitas Anak ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Perusahaan dan Entitas Anak telah melaporkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) kepada Direktorat Jenderal Pajak antara tanggal 28 September 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Aset dan liabilitas pengampunan pajak yang dideklarasikan oleh Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Jenis Aset/Liabilitas	Jumlah
Kas	22.205.650.000
Bank	16.857.636
Investasi dalam saham	2.500.000.000
Investasi dalam Saham yang Dikelompokkan dalam Aset Lepasan	4.950.000.000
Tanah	41.899.430.000
Bangunan	4.176.000.000
Kendaraan	1.798.600.000
Utang Bank	(516.930.801)
Utang Lain-lain	(11.850.000.000)
Liabilitas Sewa Pembiayaan	(80.846.577)
	65.098.760.258

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pengampunan Pajak (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas terkait dengan pengampunan pajak yang dideklarasikan oleh Perusahaan dan Entitas Anak telah diakui, diukur dan dibukukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) umum.

Perusahaan dan Entitas Anak membayar uang tebusan sebesar Rp197.500.000 pada tahun 2017 dan dicatat sebagai bagian dari Beban Pajak dalam akun Penghasilan (Beban) Lain-lain.

f. Ketetapan Pajak

Pada 31 Desember 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak ("STP") untuk berbagai jenis pajak tahun fiskal 2019 dan 2020 yang menyatakan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp 3.000.000. Perusahaan telah menyetujui tagihan pajak tersebut dan dicatat sebagai beban pajak pada laba atau rugi tahun 2023.

q. Administrasi

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 5 bagian 1 dari Perppu No. 1 tahun 2020. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 31 Maret 2020, setelah dikeluarkannya Peraturan sebagai Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Sistem Keuangan sehubungan dengan Wabah Virus Corona 2019 ("COVID-19") dan/atau untuk mengantisipasi ancaman yang akan membahayakan Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Perppu tersebut telah diundangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2020 yang berlaku efektif 18 Mei 2020.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan badan menjadi sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

17. UTANG BANK

Rincian utang bank per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dikurangi:	64.750.000.000	66.700.000.000
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	(8.000.350.076)	(7.698.700.925)
Bagian yang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	56.361.346.780	58.587.318.184

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.240/JRM/PK-KI/2017 tanggal 15 Desember 2017 antara PT Dwimukti Mitra Wisata (Entitas Anak) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Entitas Anak mendapatkan Fasilitas Kredit Investasi dengan maksimum kredit sebesar Rp100.000.000.000 untuk keperluan refinancing pembiayaan Hotel Sotis Falatehan dan Sotis Residence Penjernihan berikut sarana prasarana, mesin dan perlengkapan.

Jangka waktu kredit diberikan selama 144 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 14 Desember 2029. Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang dan memiliki jadwal pembayaran atas angsuran pokok setiap bulannya yang berkisar antara Rp300.000.000-Rp1.300.000.000 per bulan selama jangka waktu kredit. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas pinjaman di tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar 12% per tahun.

Jaminan yang diberikan atas fasilitas kredit tersebut adalah:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1458/melawai seluas 523 m2 di Jalan Falatehan I No.21 dan 22, Jakarta Selatan yang terdaftar atas nama PT Satria Mega Kencana (Perusahaan).
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1256/bendungan hilir seluas 567 m2 di Jalan Penjernihan I No.10B, Jakarta Pusat yang terdaftar atas nama PT Dwimukti Graha Elektrindo.
- Jaminan perusahaan oleh PT Satria Mega Kencana (Perusahaan) dan PT Dwimukti Graha Elektrindo.
- Jaminan perorangan oleh Vonny Kristiani.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas tersebut sebesar Rp1.950.000.000 dan Rp1.800.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023.

Saldo utang pinjaman per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp64.361.696.856 dan Rp66.286.019.109.

- a. Mengubah bentuk atau status hukum Entitas Anak, anggaran dasar, memindah tangankan saham
- b. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Entitas Anak;
- d. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- e. Mengijinkan pihak lain menggunakan Entitas Anak untuk kegiatan pihak lain;
- f. Melunasi seluruh atau sebagian utang ke pemegang saham atau perusahaan afiliasi;
- h. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk, entitas anak tanpa underlying transaction;
- i. Mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain;
- j. Menggunakan dana Entitas Anak untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit;
- k. Menerima fasilitas kredit baru dari bank lain;
- n. Melakukan likuidasi;
- p. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
 - Mengadakan kerjasama yang mengancam keberlangsungan usaha.
 - Mengadakan transaksi dengan pihak lain dengan cara-cara yang berada di luar kebiasaan yang wajar.

Disamping itu, terdapat juga rasio-rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh Entitas Anak yaitu:

- a. Current Ratio (Rasio Lancar) minimal 1 kali;
- b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,5 kali;
- c. Debt Service Coverage minimal 100%.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Entitas Anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Per tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, rasio-rasio keuangan DMW (Entitas Anak) sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Current Ratio	0,98 kali	1,09 kali
Debt to Equity Ratio	-2,43 kali	-2,45 kali
Debt Service Coverage	8,15%	23,23%

Per tanggal 31 Maret 2024, Perusahaan masih belum dapat memenuhi batasan Rasio Lancar sebesar minimal 1 kali, Debt Debt to Equity Ratio (DER) 2,5 kali, dan Debt Service Coverage (DSCR) 100%.

Pada tanggal 17 Juli 2018, Entitas Anak mendapatkan surat tertulis dari BNI No.JRM/1/365/R terkait batasan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh Entitas Anak, yaitu membayar dividen. Berdasarkan surat tersebut, Entitas Anak dapat membagi dividen tanpa persetujuan BNI selama Entitas Anak masih memenuhi financial convenant yang ditetapkan oleh BNI. Pemberitahuan wajib dilakukan 7 hari kerja sebelum tanggal efektif pembayaran dividen.

18. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

Rincian liabilitas sewa pembiayaan per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Jumlah utang sewa guna usaha	197.820.000	197.820.000
Pembayaran	(60.445.000)	(43.960.000)
Sub Jumlah	137.375.000	153.860.000
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	60.445.000	60.445.000
Bagian jangka panjang	76.930.000	93.415.000

Liabilitas sewa pembiayaan merupakan sewa pembiayaan kepada Bank Central Asia yang dilakukan oleh entitas anak DMW pada unit Sotis Falatehan untuk kendaraan operasional. Jangka waktu nya adalah 3 tahun dengan bunga 2,66% setiap tahunnya

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan pasca kerja sesuai UU CIPTAKERJA No.11/2020 berdasarkan perhitungan aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra yang dalam laporannya tertanggal 29 Februari 2024 untuk perhitungan per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode Proyeksi Kredit Unit. Sementara untuk 31 Maret 2024 Perseroan tidak menghitung liabilitas imbalan masa kerja. Berikut adalah asumsi dari Aktuaria:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Usia pensiun normal	-	55 tahun
Tingkat bunga diskonto (per tahun)	-	6,47% - 6,73%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	-	10,00%
Tingkat kematian	-	TMI IV
Tingkat cacat dari tingkat kematian	-	10% dari TMI IV

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Jumlah

Beban imbalan pasca kerja karyawan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Biaya jasa lalu	-	-
Biaya jasa kini	-	171.793.467
Biaya bunga liabilitas manfaat pasti, neto	-	91.304.607
Biaya terminasi	-	(88.963.126)
Pengakuan Segera dari Biaya Jasa Lalu yang Vested	-	-
Jumlah		174.134.948
Mutasi liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:		
	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Saldo awal	31 Maret 2024 	31 Desember 2023 1.440.231.155
Saldo awal Beban yang diakui di laporan laba rugi		
		1.440.231.155
Beban yang diakui di laporan laba rugi		1.440.231.155 174.134.948

Jumlah tercantum pada laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas Entitas dalam rangka liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

1.515.385.440

1.515.385.440

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	1.515.385.440	1.515.385.440
Jumlah	1.515.385.440	1.515.385.440

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase	imbalan pasca kerja
Tingkat diskonto		
Kenaikan	1,00%	1.419.495.039
Penurunan	1,00%	1.622.788.431
Kenaikan gaji di masa depan		
Kenaikan	1,00%	1.612.606.735
Penurunan	1,00%	1.426.470.897

Perseroan tidak melakukan perhitungan nilai liabilitas imbalan masa kerja per 31 Maret 2024, perhitungan hanya dilakukan secara tahunan menggunakan jasa aktuaris.

20. JAMINAN PELANGGAN

Rincian jaminan pelanggan per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Pihak ketiga	489.243.219	702.173.759
Jumlah	489.243.219	702.173.759

Jaminan Pelanggan merupakan uang muka atau deposit yang diberikan terlebih dahulu oleh pelanggan sebelum menggunakan jasa hotel.

21. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn No.12 tertanggal 4 Mei 2018, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 menjadi sebesar Rp240.000.000.000.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 yang terbagi atas 10.000 saham menjadi sebesar Rp60.000.000.000 yang terbagi atas 60.000 saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dilakukan dengan menerbitkan saham baru dalam simpanan yaitu sebanyak 50.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000, seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh Herman Herry Adranacus.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0010228.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018.

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn No.27 tertanggal 9 Mei 2018, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui untuk merubah nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp 100 per saham.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0010551.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dalam Akta Notaris Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn No.49 tertanggal 25 Juli 2018, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui untuk:

- 1. Merubah jumlah saham yang dikeluarkan dalam simpanan/portepel Perusahaan yang akan ditawarkan/dijual ke masyarakat melalui Penawaran Umum dari semula sebanyak-banyaknya 150.000.000 saham baru menjadi sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku.
- 2. Menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 200.000.000 yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum, dan waran ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku.
- 3. Mencatatkan Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia serta mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.59 tanggal 21 September 2018 dan Akta Hibah Saham No.60 tanggal 22 September 2018 dari Notaris Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan saham dalam Perusahaan yang dimiliki oleh Herman Herry Adranacus kepada Stevano Rizki Adranacus sebanyak 240.000.000.

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0245655 tanggal 24 September 2018.

Berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, susunan pemegang saham per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024 & 31 Desember 2023

Pemegang saham	ditempatkan dan	kepemilikan	Jumlah
Herman Herry Adranacus	260.000.000	26,00	26.000.000.000
Stevano Rizki Adranacus	247.967.600	24,80	24.796.760.000
Indjun	143.375.700	14,34	14.337.570.000
Vonny Kristiani	99.000.000	9,90	9.900.000.000
Cindy Angelina Adranacus	1.000.000	0,10	100.000.000
Masyarakat	248.660.679	24,86	24.866.067.900
Jumlah	1.000.003.979	100,00	100.000.397.900

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2023, jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Waran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, adalah sebanyak 3.979 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp397.900 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 1.000.003.979 (satu milyar tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.397.900 (seratus milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Agio Saham - Penawaran Umum Perdana	26.000.000.000	26.000.000.000
Biaya Emisi Saham - Penawaran Umum Perdana	(4.700.865.166)	(4.700.865.166)
Sub Jumlah	21.299.134.834	21.299.134.834
Agio Saham - Saham Waran	1.989.500	1.989.500
Selisih Nilai Transaksi Rekstrukturisasi Entitas		
Sepengendali	(6.809.670.464)	(6.809.670.464)
Bagian yang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	14.491.453.870	14.491.453.870

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali merupakan tambahan modal disetor atas peningkatan modal saham Perusahaan di Entitas Anak (PT Dwimukti Mitra Wisata (DMW)). Peningkatan dilakukan melalui pembelian saham DMW dari Herman Herry Adranacus dan Vonny Kristiani masing-masing sebesar 1.250 lembar saham dan 1.200 lembar saham dengan harga beli seluruhnya sebesar Rp2.450.000.000. Atas pembelian ini, timbul selisih antara harga pengalihan dengan proporsi nilai liabilitas bersih entitas anak pada saat pembelian sebesar Rp6.809.670.464 yang dicatat sebagai Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.

23. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Kepentingan non pengendali atas aset bersih entitas anak per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2024

31 Desember 2023

115.249 115.249
023
205.045
825.217)
825.217)
2023
409.005
-
537.688)
220.460
23.472

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN USAHA

Rincian penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Pendapatan Hotel		
Kamar	3.091.163.523	3.675.344.387
Makanan dan Minuman	1.412.308.109	1.357.750.106
Lain-lain	21.511.932	22.399.300
Sub Jumlah	4.524.983.564	5.055.493.793
Pendapatan Spa	25.391.736	31.785.124
Jumlah	4.550.375.300	5.087.278.917

Pendapatan kamar merupakan pendapatan atas penggunaan kamar hotel Sotis Falatehan, hotel Sotis Penjernihan dan Sotis Villa Canggu.

Pendapatan makanan dan minuman merupakan pendapatan atas penjualan dari restoran dan bar hotel Sotis Falatehan, hotel Sotis Penjernihan dan Sotis Villa Canggu.

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan dari telepon, laundry, business center, listrik dan parkir.

Tidak terdapat pendapatan dari pihak berelasi maupun pelanggan dengan transaksi lebih dari 10% total nilai pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2024 dan 2023.

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Gaji dan Tunjangan	848.601.682	814.136.877
Makanan dan Minuman	450.784.368	404.760.941
Perlengkapan Kantor dan Rumah	134.107.505	137.038.794
Pemeliharaan	83.633.064	73.273.325
Internet dan TV Kabel	77.508.313	80.594.805
Reservasi	46.758.895	46.854.657
Bahan Bakar	31.950.000	31.079.000
Kerusakan Perlengkapan dan Alat	14.909.674	16.745.851
Transportasi dan Perjalanan Dinas	1.553.000	12.892.250
Lain-lain	17.156.257	27.876.493
Sub Jumlah	1.706.962.758	1.645.252.993
Beban Operasional Spa	15.901.652	20.634.708
Jumlah	1.722.864.410	1.665.887.701

Sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi maupun transaksi dengan pemasok yang berjumlah lebih dari 10% dari jumlah beban konsolidasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Gaji dan tunjangan	133.637.133	127.045.922
Komisi	60.185.500	-
Transportasi dan Perjalanan Dinas	20.500.226	9.913.221
Sumbangan dan Hadiah	8.495.750	11.947.710
Iklan dan Promosi	7.205.457	15.079.222
Lain-lain	10.753.212	7.750.198
Jumlah	240.777.278	171.736.273

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Gaji dan Tunjangan	2.052.374.087	1.597.982.938
Penyusutan dan Amortisasi (catatan 10)	1.630.096.499	1.324.600.574
Jasa Manajemen	450.000.000	450.000.000
Listrik, Air dan Telekomunikasi	309.745.909	350.513.901
Perbaikan dan Pemeliharaan	219.052.958	389.268.647
Perijinan dan Legalitas	141.106.072	106.328.496
Jasa Profesional	67.390.000	1.000.000
Asuransi	56.806.357	54.219.310
Keamanan	50.100.000	18.850.000
Transportasi dan Perjalanan Dinas	44.256.506	35.053.012
Perlengkapan Kantor dan Rumah	12.717.472	9.543.477
Lain-lain	115.667.991	256.433.026
Jumlah	5.149.313.851	4.593.793.381

28. BEBAN KEUANGAN

Rincian beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Beban Bunga Pinjaman Bank	1.737.385.039	1.924.912.991
Beban Bunga dari Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.315.800	-
Biaya Administrasi Bank	1.103.144	1.675.536
Jumlah	1.739.803.983	1.926.588.527

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, saldo bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka pembelian, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang pembelian aset tetap dan liabilitas sewa kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut sebagian besar berjangka pendek.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Entitas pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

	31 Mar	31 Maret 2024		31 Desember 2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	
Aset Keuangan					
Kas dan Setara Kas	9.855.362.014	9.855.362.014	11.887.905.520	11.887.905.520	
Piutang usaha	745.773.728	745.773.728	396.263.229	396.263.229	
Piutang lain-lain	2.050.956.125	2.050.956.125	2.066.624.264	2.066.624.264	
Aset lain-lain	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
Jumlah	13.852.091.867	13.852.091.867	15.550.793.013	15.550.793.013	
Liabilitas Keuangan					
Utang Usaha	638.787.583	638.787.583	492.188.083	492.188.083	
Utang lain-lain	101.185.511.412	101.185.511.412	97.175.583.180	97.175.583.180	
Beban akrual	1.591.256.691	1.591.256.691	1.844.386.627	1.844.386.627	
Jaminan pelanggan	489.243.219	489.243.219	702.173.759	702.173.759	
Pinjaman bank	64.750.000.000	64.361.696.856	66.700.000.000	66.286.019.109	
Liabilitas sewa	137.375.000	137.375.000	153.860.000	153.860.000	
Jumlah	168.792.173.905	168.403.870.761	167.068.191.649	166.654.210.758	

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- b. tersebut.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Grup harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Grup menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan di mana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (i) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga) (tingkat 2), dan;
- (iii) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Entitas tidak mempunyai aset dan liabilitas keuangan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1 dan 2). The Entity does not have financial asset and liability which is measured and recognized on fair value (level 1 and 2). Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari setiap golongan instrumen keuangan Entitas:

- Kas dan setara kas, saldo bank yang dibatasi pengguaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Untuk aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, nilai tercatat aset keuangan tersebut dianggap telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.
- Utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar.
 Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar.
- Liabilitas sewa dan utang pembelian aset tetap
 Liabilitas keuangan di atas memiliki suku bunga variabel yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga jumlah terutang liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup dipersyaratkan oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Grup bahwa pembentukan dana cadangan belum bisa dilakukan.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi jumlah utang yang berdampak bunga dengan jumlah ekuitas. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah liabilitas sewa dan utang pembelian aset tetap.

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2024	31 Desember 2023
Utang bank	64.361.696.856	66.286.019.109
Liabilitas sewa	137.375.000	153.860.000
Dikurangi: Kas dan setara kas	(9.855.362.014)	(11.887.905.520)
Utang Bersih	54.643.709.842	54.551.973.589
Jumlah Ekuitas	207.269.392.619	228.034.843.175
Rasio pengungkit	26,36%	23,92%

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. RUGI PER SAHAM DASAR		
	31 Maret 2024	31 Maret 2023
Rugi untuk perhitungan Rugi Bersih per saham	(4.236.874.496)	(3.251.120.414)
Jumlah Lembar Saham		
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar		
untuk perhitungan Rugi Bersih per saham Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000
Pengaruh Efek Berpotensi Saham Biasa yang Dilutif -		
Waran	199.996.021	199.999.925
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa untuk		
Perhitungan Rugi Bersih per Saham Dilusian	800.003.979	800.000.075
Rugi per saham:		
- Dasar	(4,24)	(3,25)
- Dilusian	(5,30)	(4,06)

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan

33. LIABILITAS BERSYARAT

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas bersyarat pada tanggal-tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.